



## Upaya Pemulihan Pendapatan Nasional Sektor Pariwisata Melalui Kebijakan Fiskal di Indonesia Pasca Pandemi

*Tourism Sector National Income Recovery Through Fiscal Policy in Indonesia Post Pandemic*

<sup>1)\*</sup> Aisyah Alifiah Dinhaq Lubis, <sup>2)</sup> Dedek Kustiawati, <sup>3)</sup> Reka Fadlia Elvantio,  
<sup>4)</sup> Sri Sundari

<sup>1,2,3,4</sup> FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\*Email: <sup>1)\*</sup> aisyah.dinhaq20@mhs.uinjkt.ac.id, <sup>2)</sup> dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id,

<sup>3)</sup> reka.fadlia1820@mhs.uinjkt.ac.id, <sup>4)</sup> sri.sundari20@mhs.uinjkt.ac.id

\*Correspondence: Aisyah Alifiah Dinhaq Lubis

DOI:

### ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 05-12-2022

Diterima : 15-12-2022

Diterbitkan :

Sektor pariwisata merupakan kontributor penerimaan negara dalam bentuk devisa dan berperan dalam meningkatkan produktivitas serta mengurangi pengangguran. Adanya covid-19 sangat mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional semakin menurun. Sektor yang paling terdampak yaitu transportasi, travel, gudang dan sektor penyediaan akomodasi serta makan. Kemudian sektor yang lain adalah sektor pariwisata di Indonesia, sekitar 11,83% pekerja Indonesia berada sektor Industri pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau dampak dari Covid -19 yang mengakibatkan turunnya sektor industri pariwisata di Indonesia dan juga merespon dari kebijakan Pemerintah agar penanganan dampak Covid -19 terhadap sektor pariwisata dapat dilakukan dengan baik dan pariwisata kembali normal dengan prosedural kesehatan. Adanya kebijakan karantina kesehatan, sosial distancing maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat mempengaruhi aktifitas sektor pariwisata dan manufaktur yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat sehingga pendapatan nasional menurun. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor Pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian nasional yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan yang terjadi pada perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara, devisa penerimaan sektor pariwisata, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional. Tenaga kerja berkurang, tingkat pengangguran dan kemiskinan bertambah akan menyebabkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan (PPh) berkurang, oleh karena itu perlu ada strategi untuk pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal Adalah Salah Satu Kebijakan Ekonomi Yang Dicanangkan Suatu Negara Untuk Mengelola Serta Mengarahkan Perekonomian Ke Kondisi Yang Lebih Kondusif. Cara Yang Ditonjolkan Dari Kebijakan Ekonomi Ini Adalah Dengan Mengubah Maupun Memperbarui Pengelolaan Pendapatan Dan Pengeluaran Negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data untuk penelitian ini berdasarkan pada studi kepustakaan atau library research berupa buku, literature, jurnal, artikel mengenai industry pariwisata, serta cara pemulihannya pada pasca pandemi yaitu dengan adanya kebijakan fiskal. Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan pariwisata sebelum dan pasca pandemi.

**Kata kunci:** Pendapatan Nasional; Sektor Pariwisata; Kebijakan Fiskal

#### **ABSTRACT**

*The tourism sector is a contributor to state revenue in the form of foreign exchange and plays a role in increasing productivity and reducing unemployment. The existence of COVID-19 has greatly affected the balance of national income, which has decreased. The sectors most affected are transportation, travel, warehouses and the accommodation and food provision sector. Then the other sector is the tourism sector in Indonesia, about 11.83% of Indonesian workers are in the tourism industry sector. The purpose of this study is to review the impact of Covid -19 which has resulted in the decline of the tourism industry sector in Indonesia and also to respond to Government policies to handle the impact The existence of health quarantine policies, social distancing and Large-Scale Social Restrictions (PSBB) greatly affects the activities of the tourism and manufacturing sectors which causes economic growth to slow down so that national income declines. Tourism is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic. The tourism sector is the mainstay sector of the national economy that has the potential to encourage economic growth in Indonesia. This is indicated by the increase in the development of foreign tourist arrivals, foreign exchange receipts from the tourism sector, and the contribution of the tourism sector to national GDP. Reduced labor force, unemployment and poverty will increase will cause state revenues in the form of income tax (PPh) to decrease, therefore there needs to be a strategy for economic recovery in the tourism sector, namely fiscal policy. Fiscal policy is one of the economic policies launched by a country to manage and direct the economy to a more conducive condition. The way that this economic policy is highlighted is by changing or updating the management of state revenues and expenditures. This study uses a qualitative descriptive method and the data for this research is based on library research in the form of books, literature, journals, articles about the tourism industry, and how to recover in the post-pandemic, namely fiscal policy. Data obtained through the Central Statistics Agency regarding the development of tourism before and after the pandemic.*

**Keywords:** *National Income; Tourism Sector; Fiscal Policy*

---

#### **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dinilai mampu menjadi alternatif pergerakan perekonomian. Pariwisata sebagai sektor unggulan dalam perolehan devisa, pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, maupun memberantas kemiskinan. Sektor pariwisata bahkan menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara (Elistia, 2021).

Pada awal tahun 2020 dunia dilanda musibah dengan hadirnya wabah virus covid-19. Covid-19 adalah wabah global yang mulanya terjadi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar dengan cepat ke 210 negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk membatasi penyebaran covid-19 pemerintah di seluruh dunia mengambil sebuah tindakan yaitu memberlakukan Lockdown atau melarang seluruh negara atau kota-kota yang paling terdampak covid untuk memasuki wilayah perbatasan mereka (Betty & Abdullah: 2021). Di Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan adanya pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat, mengakibatkan menurunnya aktivitas operasional kegiatan di berbagai sektor, baik sektor politik, ekonomi, pariwisata, pendidikan dll. Sektor pariwisata sangat terdampak, dapat dilihat dari

penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu total kunjungan wisman pada Januari-Mei 2020 sebesar 2,9 juta menurun 53,36 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,3 juta kunjungan (BPS, 2020). Menurut data dari Kemenparekraf dalam publikasi tahun 2021 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Atau menyusut 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Lalu, menurut data kemenparekraf laju perkembangan wisatawan mancanegara untuk lima tahun terakhir yakni; 2018: 15,8 Juta, 2019: 16,1 Juta, 2020: 4,1 Juta, 2021: 1,6 Juta, 2022: 2,3 Juta. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selisih pengunjung dari tahun 2019 ke 2020-saat ini sangat signifikan. Hal ini berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata (Ikbal & Gerry: 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan baik jangka pendek (masa pandemi) dan jangka panjang (pasca pandemi). Berbagai strategi dilancarkan oleh pemerintah demi menanggulangi permasalahan perekonomian bangsa, salah satunya dengan kebijakan fiskal (Saniatul: 2021). Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kebijakan fiskal menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi.

### **Bisnis Pariwisata**

Pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari memiliki arti berulang kali atau seringkali. Sedangkan wisata artinya perjalanan atau bepergian. Jadi secara etimologis pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan secara berulang kali. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. I Ketut Setia Sapta dan Nengah Landra (2018) mengutip pendapat James.J. Spillane tentang pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan kenangan, kepuasan, pengetahuan, suasana baru dan lain sebagainya yang bersifat sementara. Sehingga dapat disimpulkan pengertian pariwisata adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam waktu tertentu dari satu tempat ke tempat lain yang menimbulkan interaksi antar sesama untuk keperluan bisnis atau mencari kesenangan yang dilakukan sementara namun berulang kali.

Usaha pariwisata atau bisnis pariwisata adalah seluruh usaha yang dapat dinikmati oleh wisatawan sejak awal ketertarikan untuk berwisata kemudian menikmati lokasi tujuan berwisata sampai akhir perjalanan hingga wisatawan dapat mengenang kegiatan berwisata tersebut (Tupamahu, 2020). Usaha pariwisata dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Jadi usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan pelayanan berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang dapat dinikmati pada sebelum, saat dan sesudah melakukan pariwisata. Selain itu penyediaan usaha pariwisata juga bertujuan agar kegiatan pariwisata dapat berjalan.

### **Covid-19**

Menurut WHO, covid-19 atau yang disebut dengan virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia (Betty & Abdullah: 2021). Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (Ikbal & Gerry: 2021). Tidak hanya waspada

terhadap penyebaran penyakitnya saja akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian dunia (Eka: 2020).

Dua tahun terakhir ini COVID-19 cukup menjadi perhatian besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, ada banyak kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia salah satunya kerugian pada pendapatan nasional negara (Eka:2020). Melansir konferensi pers kementerian keuangan Indonesia (21 oktober 2022), bahwasannya pandemi Covid-19 global semakin terkendali. Namun di sisi lain, prospek perekonomian global terus melemah. Harga komoditas global masih volatile dan cenderung tinggi meski terdapat peningkatan demand pasca pandemi. Hal ini disebabkan peningkatan demand tersebut tidak diikuti dengan perbaikan pada sisi supply. Selain itu, tekanan inflasi yang masih tinggi mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara dan berpotensi meningkatkan cost of fund dan pengetatan likuiditas global serta dapat menyebabkan terjadinya resesi di beberapa negara. Hal ini menjadi tantangan perekonomian Indonesia pada masa transisi pandemi menjadi endemi.

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan Fiskal merupakan kebijaksanaan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perkenomian dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pajak dan pinjaman. Henny (2020) mengungkapkan sumber penerimaan atau pendapatan dari negara berupa pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan pinjaman/bantuan luar negeri. Sehingga kebijakan fiskal berperan sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian nasional baik dalam hal produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja dan bahkan kestabilan harga.

Tujuan kebijakan fiskal sudah tertuang dalam pengertian diatas yaitu kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal bersifat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi karena mengukur keseimbangan antara permintaan agrerat dan penawaran agrerat yang dapat digunakan untuk mencapai stabilitas harga dan neraca pembayaran. (Akhyar dkk.: 2019). Menurut Desi (2017) upaya membangun pertumbuhan ekonomi yang signifikan, merata dan pengaturan inflasi agar tidak terjadi krisis moneter merupakan cerminan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN terhadap kebijakan fiskal dalam negara. Penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah ditetapkan dalam APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi

Jenis kebijakan fiskal (Masniadi & Kaluge: 2011) :

#### 1. Kebijakan Fiskal Ekspansif/ Defisit

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan nilai pengeluaran atau belanja lebih besar dari nilai penerimaan atau pendapatan. Tujuannya adalah untuk memberi suntikan stimulus pada perekonomian. Kebijakan ini baik digunakan pada saat keadaan ekonomi sedang resesif atau lesu.

#### 2. Kebijakan Fiskal Kontraktif/ Surplus

Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan nilai penerimaan atau pendapatan lebih besar dari nilai pengeluaran atau belanja. Tujuannya adalah untuk menghindari lonjakan nilai inflasi. Maka kebijakan ini baik ketika keadaan ekonomi sedang ekspansi atau memanas.

#### 3. Kebijakan fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan pemerintah dalam menetapkan nilai penerimaan atau pendapatan sama besar dengan nilai pengeluaran atau belanja. Sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan anggaran dan dapat menghindari penambahan utang negara.

## **Penerimaan Negara**

Menurut Dumairy, Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Dina & Rasinta: 2020), terdiri atas :

Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak dalam negeri berupa:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. Cukai
7. Pajak Lainnya.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara (Parmadi: 2011). Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yaitu PPh, PPN, dan cukai. Peningkatan kontribusi penerimaan perpajakan tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor ekonomi dan upaya internal (Parmadi: 2011).

Salah satu bentuk upaya internal yakni dalam meningkatkan penerimaan PPB dan BPHTP pemerintah terus mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 adalah penerbitan ketetapan untuk meningkatkan pengenaan nilai jual kena pajak (NJKP) dari 20 persen sampai 40 persen menjadi 20 persen sampai 50 persen (Parmadi: 2011).

## **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) yakni suatu tindakan atau wewenang pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tersusun didalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Menurut Samuelson, pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih daripada pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik; dan permasalahan yang dihadapi ( Dina & Rasinta: 2020).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$ .

Ket:

Y = Produk Domestik Bruto

C = Belanja Konsumsi

I = Belanja Investasi

G = Belanja Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan persamaan dari teori diatas kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonominya dapat ditelaah bahwasannya kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Berdasarkan teori Wagner bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena



pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengelola anggaran rumah tangganya sendiri. Pengeluaran pemerintah mencakup Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Dina & Rasinta:2020). Menurut Boediono, dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Azwar: 2016) :

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat

Sedangkan dalam tinjauan mikro menurut Basri, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Azwar: 2016).

Adapaun prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah, Menurut (Aries Djaenuri: 2016), yakni : 1). *Public benefits*, mengutamakan kepentingan masyarakat; 2) *Equity*, mempertimbangkan siapa atau kelompok mana yang diuntungkan; 3). *Economic efficiency*, tidak ada monopoli; 4). *Setting priority*, penetapan prioritas; 5) *Financial resources mobilization*, yaitu pendayagunaan keuangan di luar pemerintah; dan 6) *decentralization of responsibility*, respon terhadap urusan desentralisasi (Luciana)..

## **METODE**

Penelitian Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19 ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif kualitatif . yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. (Arikunto: 2010) untuk memahami fenomena Pandemi Covid 19 yang mengancam keterpurukan ekonomi salah satunya sektor industri pariwisata di Indonesia. yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan suatu informasi dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan (Silalahi & Ginting: 2020). Menurut (Sari, M. S., & Zefri: 2019) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui sebuah buku maupun dari

hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari Badan Pusat Statistik dan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Anggarini: 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sektor Pariwisata Sebelum Covid-19**

Menurut (Kartiko, 2020), Salah satu sektor yang mengalami guncangan cukup parah akibat wabah pandemi COVID-19 adalah sektor pariwisata. Menurut KADIN, pukulan tersebut juga dialami oleh turunan sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, airlines dan dampak tersebut juga dialami oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Bayu: 2020). Padahal sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada tahun 2018 merilis hasil penelitiannya terkait dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata secara umum memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh efek pengganda (multiplier effect) di Indonesia. Efek pengganda menyebabkan seluruh pengeluaran wisatawan, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah memberikan dampak ekonomi berupa pertambahan output, nilai tambah, pendapatan, dan penciptaan tenaga kerja di Indonesia (LPEM FEB UI: 2019).

Kementerian Pariwisata (2018) memberikan data terkait realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2017, data tersebut menunjukkan sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,11% PDB Nasional. Apabila semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, maka semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. LPEM FEB UI (2018) menyatakan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak positif pada aliran devisa masuk. Selain itu, jasa perjalanan sebagai salah satu unsur dalam sektor pariwisata menunjukkan secara konsisten berkontribusi positif terhadap neraca jasa dengan nilai yang semakin meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, sebelum pandemi COVID-19 memasuki Indonesia jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada bulan Januari 2020 mengalami kenaikan 5,85 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019, jumlah kunjungan wisman pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62 persen. Apabila dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, maka kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan trend yang meningkat. Jumlah kunjungan wisman selama 2019 merupakan jumlah tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2018 yang tercatat 15,81 juta kunjungan (BPS: 2020).

### **Sektor Pariwisata Saat Pandemi Covid-19**

Pada tahun 2020, seperti kita ketahui di seluruh dunia mengalami wabah pandemi Covid 19 (*Corona Virus Disease 2019*) seperti yang telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sejak tanggal 11 Maret 2020 (Marves: 2022). Kasusnya juga menunjukkan peningkatan yang cepat sampai pada 17 Oktober 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 39,3 juta dengan total korban meninggal sebanyak 1,1 juta di dunia, 357.762 orang terpapar dan 12.431 orang meninggal dunia di Indonesia (Murdo & Affan: 2020).

Pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020, telah mengakibatkan pemerintah harus memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, guna mencegah penyebaran virus covid 19. Pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak hanya pembatasan aktivitas belajar dan berkumpul, akan tetapi termasuk pembatasan kegiatan usaha. Adanya pembatasan terhadap kegiatan usaha, tentu akan berakibat pada pengurangan aktivitas pegawai, bahkan dapat berakibat kepada pemberhentian pegawai (PHK). Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen dibandingkan dengan bulan Agustus 2019. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan terhadap angkatan kerja. (Pariwisata et al.: 2022)

Hal ini berimbas pada ditentukannya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang memberikan pembatasan kepada masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah termasuk kepada berbagai sector masyarakat formal maupun informal (Nasruddin: 2020). Menurut purnamasari (Purnamasari, 2021) Contoh besarnya terdapat pada aspek seperti ekonomi, social,serta pariwisata dengan contoh kecilnya seperti yang terjadi pada wisata kota batu pada perekonomian pariwisata yang mengandalkan dan bertumpu melalui perekonomiannya. Pandemi covid 19 juga berdampak kepada industri pariwisata. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada terjadinya penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara, melalui pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan kegiatan pariwisata.

Dengan melihat kejadian yang terjadi pada wisata kota Batu dapat kita simpulkan kepada pendapatan yang dimiliki oleh sebuah daerah dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menjadi sector penting atau menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena kontribusinya yang besar seperti dapat menyerap tenaga kerja yang menjadikannya sebagai penyumbang lebih dari 60% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional (Pratama, kismartini, & Rahman, 2021). Menurut Arianti pada tahun 2014 (Patricia, 2021). Sektor wisata merupakan sektor vital dalam struktur ekonomi nasional. Berdasarkan penelitian dari (Arianti, 2014) yang mengkaji peran dari sektor wisata terhadap ekonomi secara nasional. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa struktur permintaan dalam perekonomian khususnya peran sektor pariwisata adalah sebesar 40,86%.

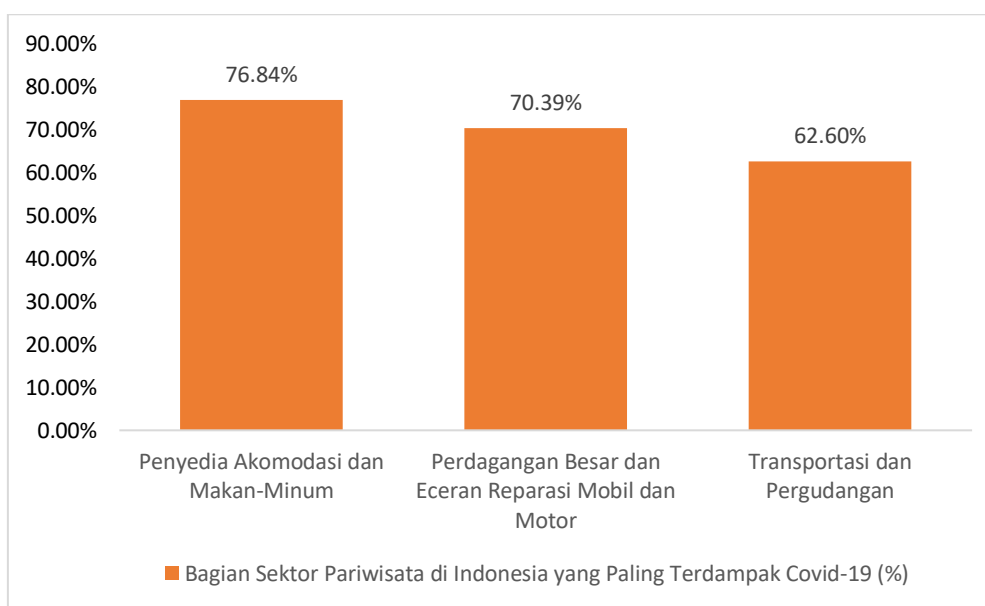
Menurut Kementerian pariwisata pada tahun 2019 (Silalahi & Ginting, 2020) Sektor pariwisata menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan mampu menyumbang devisa sebesar USD 19,3 Miliar. Kontribusi sektor pariwisata mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran di Indonesia yang tercatat mengalami defisit sebesar USD 7,1 Miliar pada tahun 2018, dan diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 303,4 juta perjalanan wisatawan nusantara dengan pertumbuhan 12,37%, disertai total pengeluaran wisatawan sebesar Rp291 triliun, dengan tingkat pertumbuhan belanja sebesar 17,9%.

Sugihamretha pada tahun 2020 (Anggarini, 2021) mengatakan, pada industri pariwisata terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan kunjungan wisatawan mancanegara juga pembatalan penerbangan tiket pesawat, hotel serta penurunan pemesanan. Hal ini juga terjadi penurunan karena perlambatan perjalanan domestik, terutama wisatawan domestik, keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan, dikhawatir penyebaran dampak Covid-19 di daerah wisata. Hal ini juga terjadi pada penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, pekerja informal dan lapangan kerja semakin turun. Perlu kita ketahui bahwa selama ini pariwisata adalah sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih dari 13 juta pekerja, dampak turunan atau multiplier effect yang



mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk dibawahnya juga mengalami imbas dari pandemik COVID 19 di sektor pariwisata.

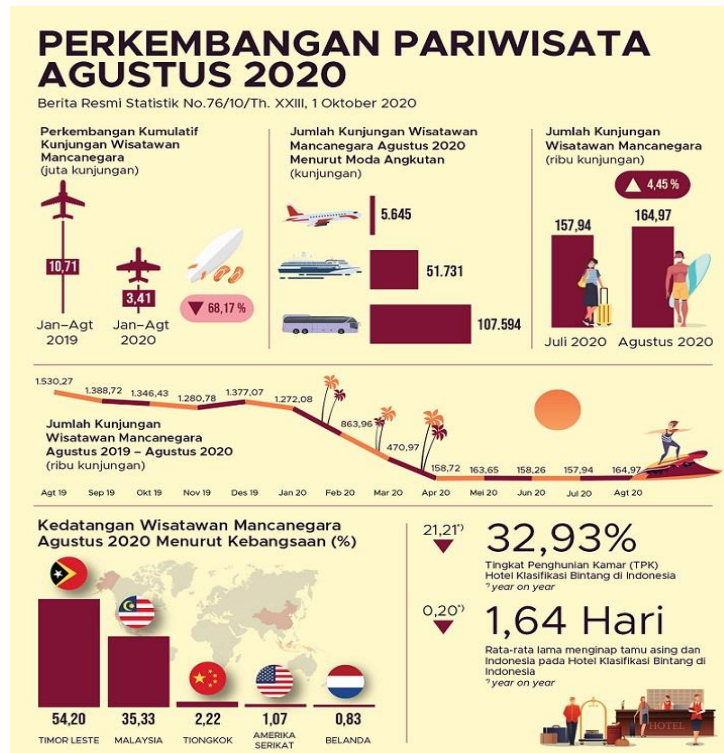
Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (Anggarini, 2021) bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia awal tahun 2020 mengalami penurunan. Pada bulan Januari 2020, tercatat kunjungan wisman mencapai 1,27 juta kunjungan. Angka ini menurun 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bulan Desember 2019 sebanyak 1,37 juta. Hal ini terjadi karena penurunan jumlah kunjungan ini disebabkan karena merebaknya Covid-19 yang terjadi di akhir Januari 2020.



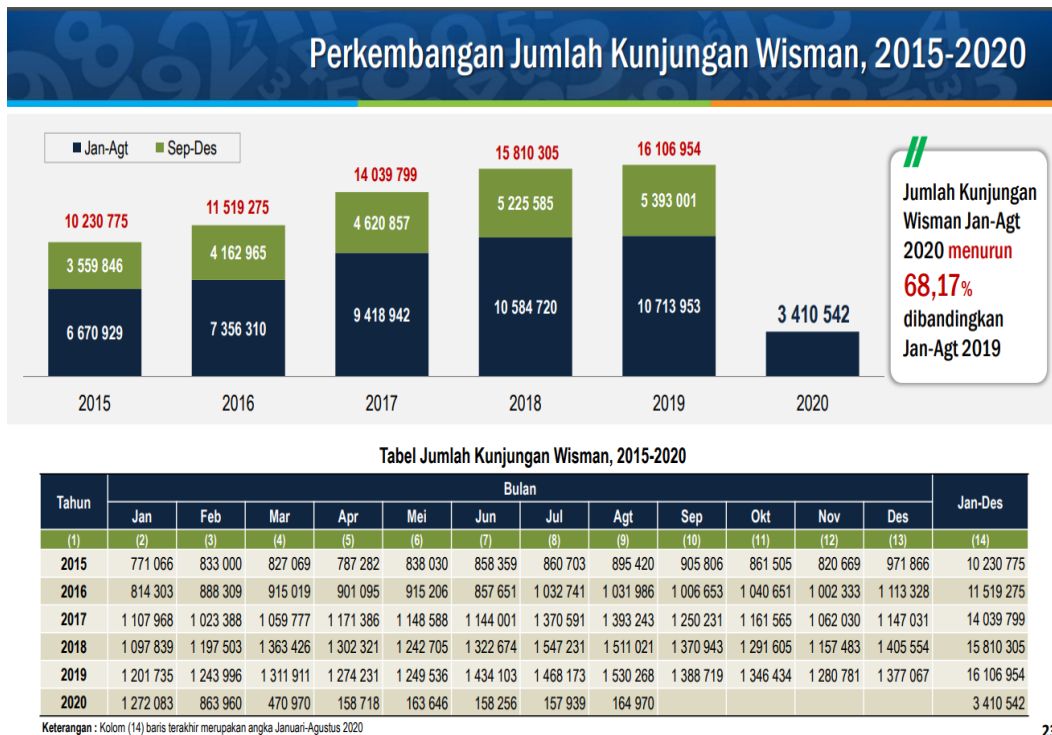
Gambar 1. Bagian Sektor Pariwisata Di Indonesia Yang Paling Terdampak Covid-19  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020b (diolah)

Penurunan kunjungan wisatawan asing ketanah air juga terlihat dari data wisatawan asing yang datang melalui udara (bandara), jika dibandingkan dengan kunjungan pada bulan Desember 2019, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia melalui pintu masuk bandara pada bulan Januari 2020 mengalami penurunan 5,01 persen.

Kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan data dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ke Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 89,22 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Agustus 2019. Secara kumulatif (Januari–Agustus 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 10,71 juta kunjungan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai rata-rata 32,93 persen atau turun 21,21 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 54,14 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Agustus 2020 tercatat sebesar 1,64 hari, terjadi penurunan sebesar 0,2 poin jika dibandingkan keadaan Agustus 2019. (BPS, 2020)

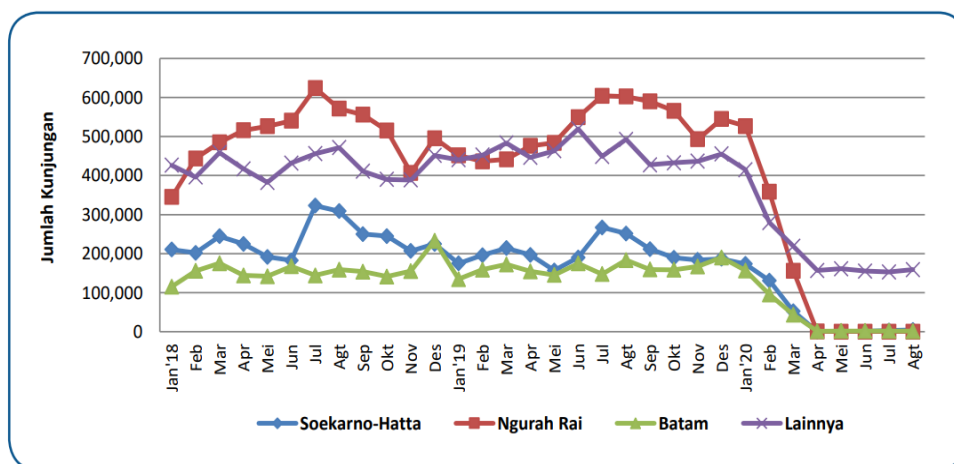


Gambar 2. Perkembangan Pariwisata Bulan Agustus 2020  
 Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020)



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, 2015-2020  
 Sumber: (BPS, 2020)

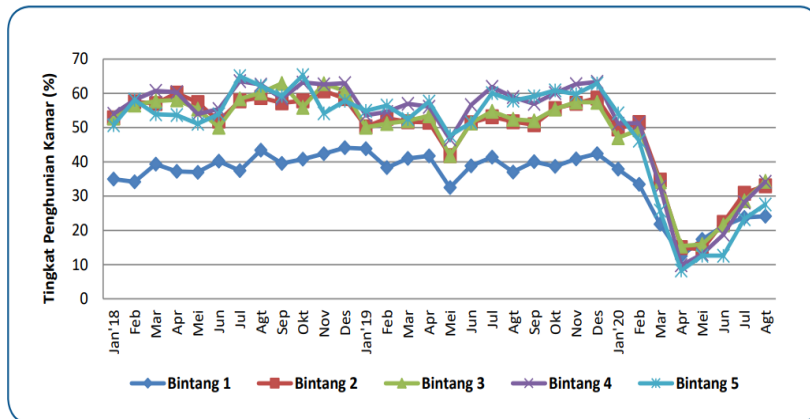
Jumlah kunjungan wisman ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 1,61 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 846,21 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 952,34 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 164,97 ribu kunjungan, mengalami penurunan drastis sebesar 89,22 persen jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2019 yang berjumlah 1,53 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Juli 2020, jumlah kunjungan wisman Agustus 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,45 persen. Jumlah ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 5,65 ribu kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 51,73 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 107,59 ribu kunjungan. Dilihat berdasarkan pintu masuk udara, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 99,42 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan kunjungan wisman tersebut terjadi di seluruh pintu masuk udara. Persentase penurunan terendah tercatat di Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara sebesar 93,56 persen. Selanjutnya diikuti oleh Bandara Soekarno-Hatta, Banten dan Bandara Sultan M. Badaruddin II, Sumatera Selatan masing-masing sebesar 98,22 persen dan 99,07 persen. Sementara itu, Bandara Ngurah Rai, Bali, Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat, Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Bandara Ahmad Yani, Jawa Tengah, Bandara Supadio, Kalimantan Barat, Bandara Hasanuddin, Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 100,00 persen.



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman yang Masuk Januari 2018-Agustus 2020  
Sumber : (BPS, 2020)

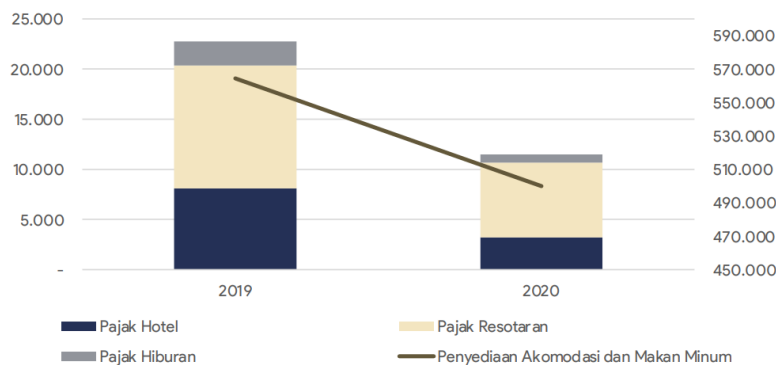
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai rata-rata 32,93 persen. Angka ini turun sebanyak 21,21 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 54,14 persen. Sementara itu, jika dibanding dengan TPK Juli 2020 yang tercatat 28,07 persen, TPK Agustus 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,86 poin. TPK tertinggi tercatat di Provinsi Lampung sebesar 48,71 persen, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46,81 persen, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 45,80 sedangkan TPK terendah tercatat di Provinsi Bali yang sebesar 3,68 persen. Penurunan TPK hotel klasifikasi bintang pada Agustus 2020 dibanding Agustus 2019 tercatat di seluruh provinsi kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kenaikan sebesar 4,27 poin. Sementara itu, penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Bali yaitu sebesar 63,42 poin, diikuti

oleh Provinsi Maluku Utara sebesar 33,94 poin, dan Provinsi Aceh sebesar 31,96 poin. Sedangkan penurunan terendah tercatat di Provinsi Maluku yaitu sebesar 0,82 poin. Jika dibandingkan dengan TPK Juli 2020, TPK Agustus 2020 mengalami peningkatan hampir di semua provinsi, dengan kenaikan tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 20,37 poin. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara masing-masing sebesar 13,88 persen dan 12,40 poin. Sementara itu, kenaikan terendah tercatat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 0,51 poin.



Gambar 5. Perkembangan TPK Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia Januari 2018–Agustus 2020  
 Sumber: (BPS, 2020)

Dalam Travel & Tourism Competitiveness Index tahun 2019 (Pambudi et al., 2020), dari 4 komponen penilaian, Indonesia memiliki keunggulan dalam komponen kebijakan dan kondisi pariwisata yakni menempati peringkat 4 dari 140 negara, dan komponen Sumber Daya Alam dan Budaya menempati peringkat 18 dari 140 negara (Calderwood & Soshkin, 2019). Sektor pariwisata mampu menyediakan 13,8 juta lapangan pekerjaan atau setara dengan 1 dari 9 pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain memberikan dampak lapangan pekerjaan, pariwisata juga menciptakan dampak tidak langsung dan dampak induksi ke industri lainnya, termasuk ke UMKM. Tingginya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan valuta asing, mendorong industri pendukung lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keindahan alam dan budaya di Indonesia.



Gambar 6. Pajak Daerah Dan PDRB Sektor Pariwisata  
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Hotel Berbintang Jumlah Kunjungan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk menjadi proksi indikator kondisi pendapatan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; serta pajak daerah sektor wisata meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 11,42%, sedangkan pajak daerah sektor wisata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 49,61%. (Primanto Bhakti et al., 2021)

Menurut (Nawawi, 2021) Pandemi covid-19 memberikan dampak yang serius bagi perekonomian nasional secara kompleks yang dapat terlihat dari berbagai indikator makro ekonomi selama pandemi covid-19 berlangsung. Hal yang paling signifikan mengalami efek negatif yaitu pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik bruto. Pandemi covid-19 dapat memberikan efek langsung pada perekonomian khususnya dapat menyebabkan penurunan produk domestik bruto (PDB), bahkan jika kondisi memburuk dengan jumlah pengidap covid-19 dalam jumlah yang sangat besar maka dapat menyebabkan resesi ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena selama pandemi covid-19 berlangsung segala aktivitas sosial dibatasi dan akan mengurangi tingkat permintaan secara agregat karena konsumsi masyarakat berkurang, begitupun pada penawaran agregat akan berkurang karena kegiatan produksi berkurang karena pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Lebih dari itu, pandemi covid-19 diprediksi dapat menimbulkan permasalahan pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, pasar keuangan, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya.



Gambar 7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut PDB 2018-2020

Sumber : (BPS, 2020)



Perekonomian nasional pasca merebaknya pandemi covid-19, khususnya pada Triwulan II tahun 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2020 (y-on-y) sebesar - 5,32%.<sup>12</sup> Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir semua sektor usaha dan industri. Sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,84%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 22,02%, Sektor Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi pertumbuhan meskipun tidak sebesar sektor transportasi dan akomodasi makanan minuman karena hanya mengalami kontraksi sebesar 6,19%. Di samping itu, terdapat beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,56%; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,71%. Begitupun dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,19%. Fenomena kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada usaha Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Industri Pengolahan tidak lepas dari menurunnya kinerja sektor pariwisata. Hal ini terjadi ketika sektor pariwisata pada berbagai wilayah menjadi lumpuh akibat pandemi covid-19 dan kebijakan PSBB membuat para wisatawan enggan untuk melakukan perjalanan wisata, sedangkan sektor transportasi sangat bergantung pada adanya aktivitas wisatawan. Begitupun yang terjadi pada sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman dan industri pengolahan yang terdampak cukup signifikan dikarenakan dengan tidak adanya aktivitas wisatawan maka permintaan akan barang dan jasa tentunya akan berkurang secara signifikan. Alhasil ketiga sektor usaha tersebut menyumbang kontraksi ekonomi terbesar selama Triwulan II Tahun 2020.

Namapemda	Pajak Daerah Sektor Pariwisata (miliar Rp)			Kemiskinan (ribu orang)		
	2019	2020	Selisih	2019	2020	Selisih
Prov. DKI Jakarta	6.229,08	2.908,53	- 3.320,55	365,55	480,86	115,31
Kab. Badung	3.316,60	961,44	- 2.355,15	11,89	13,75	1,86
Kota Surabaya	924,39	452,38	- 472,01	130,55	145,67	15,12
Kab. Gianyar	533,99	148,92	- 385,07	19,85	21,01	1,16
Kota Bandung	771,48	391,89	- 379,59	84,67	100,02	15,35
Kab. Tangerang	498,25	261,80	- 236,45	193,97	242,16	48,19
Kota Denpasar	382,84	157,27	- 225,57	19,83	20,48	0,65
Kota Tangerang	383,17	181,30	- 201,87	98,37	118,22	19,85
Kota Medan	374,80	209,33	- 165,46	183,79	183,54	- 0,25

Gambar 8 Penurunan Pajak Daerah Sektor Pariwisata (miliar Rp)

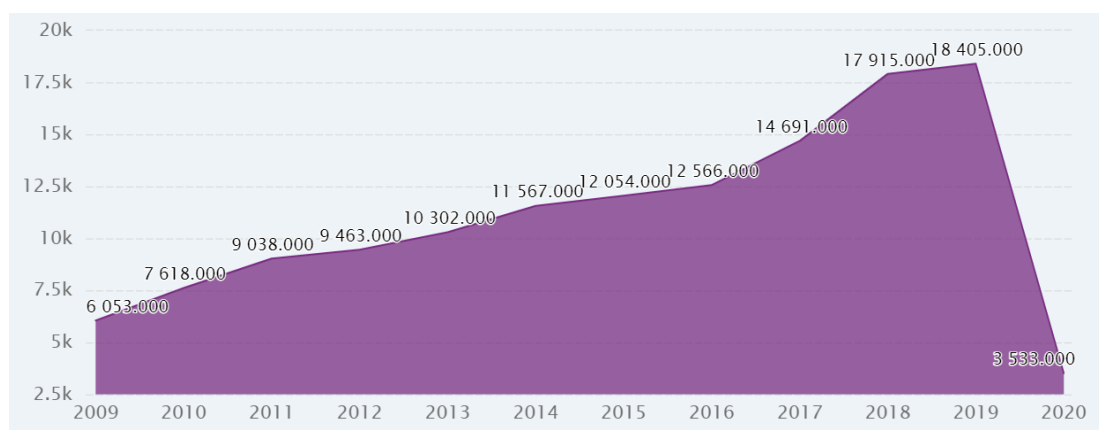
Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Dampak penurunan PDRD sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan Pajak Daerah sektor wisata dialami sangat dalam oleh hampir semua daerah di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang secara nominal mengalami penurunan pajak daerah paling dalam atau setara dengan 53,31%. Hal ini diikuti dengan jumlah kemiskinan yang bertambah naik sebesar 115.310 orang. Untuk level kabupaten/kota, daerah yang nominalnya terdampak paling dalam adalah Kab. Badung atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 71,01% (Primanto Bhakti et al., 2021)

Langkah-langkah penahanan memberi tekanan pada sektor manufaktur dan jasa global. Sektor pariwisata paling terpuak, dengan proses pemulihan diprediksi sangat bertahap. Menurut UNWTO, sektor pariwisata internasional mengalami kontraksi 22% selama Q1-20 dan berpotensi turun 60%-80% sepanjang tahun 2020. Travel ban telah mengganggu industri penerbangan, perjalanan, dan perhotelan. International Aviation Association (IATA) memperkirakan potensi kerugian industri penerbangan hingga USD314 miliar pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Perusahaan penerbangan menunda perawatan pesawat, menunda/membatalkan rencana investasi, dan meminta karyawan keluar dari tanggungan mereka untuk melakukan pemecatan yang signifikan (KPMG, 2020).

### Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi dengan Kebijakan Fiskal

Pendapatan Pariwisata Indonesia dilaporkan sebesar 4 USD bn pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 18 USD bn untuk 2019. Data Pendapatan Pariwisata Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 8 USD bn dari 2002 sampai 2020, dengan 19 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 18 USD bn pada 2019 dan rekor terendah sebesar 4 USD bn pada 2020. Data Pendapatan Pariwisata Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data.



Gambar 9. Pendapatan Pariwisata Indonesia dari 2002 sampai 2020

Sumber : CEIC Data

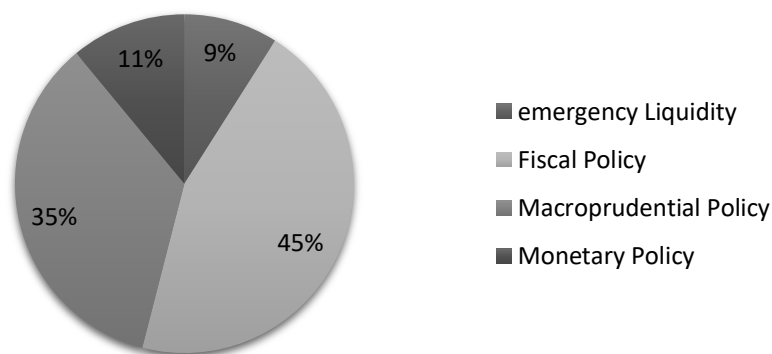
Untuk mendukung perekonomian secara keseluruhan, ekspor dan pengeluaran pemerintah diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mendukung dan kebijakan moneter yang akomodatif akan membantu menopang pertumbuhan. Konsumsi swasta diproyeksikan baru sedikit pulih tahun ini sebelum naik sebesar 5,0% tahun depan. Selain itu, investasi diharapkan menguat seiring dengan normalnya kondisi dan perbaikan iklim usaha. Oleh karena itu, langkah-langkah pemulihan ekonomi dalam program PC PEN sangat penting untuk dikedepankan guna menahan pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, insentif untuk sektor pariwisata, antara lain bantuan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan relaksasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di sektor pariwisata tetap dilanjutkan. (Primanto Bhakti et al., 2021)

Selama pandemi COVID-19 hampir seluruh sektor usaha mengalami tekanan yang besar. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mengurangi tekanan dan perbaikan perekonomian di Indonesia. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk stimulus fiskal adalah insentif pajak. Berikut daftar instrumen di bidang perpajakan

khususnya insentif pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam merespons COVID-19 (Kartiko, 2020) :

- a. PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)
- b. Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang)
- c. PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Penurunan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19 telah mendorong langkah agresif otoritas dunia. Selain langkah-langkah kebijakan penguatan sektor kesehatan, otoritas juga memperhatikan upaya mengatasi dampak pelemahan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus (Suksmonohasi & Indira, 2019). Sasaran kebijakannya juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah daerah, dan menysasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan ASEAN juga menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi dampak pandemi. Respons kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan likuiditas darurat. Menurut Yale University, hingga April 2020, kebijakan fiskal paling banyak digunakan (45% dari total kebijakan), diikuti oleh makroprudensial (35%), moneter (11%), dan likuiditas darurat (9%). Korea Selatan dan AS merupakan negara yang paling agresif mengeluarkan kebijakan fiskal dan makroprudensial. Nilai stimulus fiskal dalam menanggapi COVID-19 mencapai sekitar 3,7% dari PDB Dunia. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan KKG 2008/2009, yaitu sekitar 1,5% dari PDB. Nilai ini akan terus meningkat seiring dengan diluncurkannya beberapa stimulasi (Sugihamretha, 2020)



Gambar 10. Kebijakan Untuk Mengatasi Covid-19  
Sumber : Masagung

Kebijakan fiskal untuk menghadapi COVID-19 memiliki karakteristik yang berbeda dengan saat KKG. Stimulus fiskal selama KKG 2008/2009 difokuskan pada investasi publik dan asuransi pengangguran. Sementara itu, selama krisis COVID-19, pemerintah memprioritaskan bantuan kepada sektor tenaga kerja dan rumah tangga melalui skema retensi pekerjaan, asuransi pengangguran, pembayaran tunai langsung, dan relaksasi pajak. Pemerintah juga membantu sektor kesehatan dan bisnis yang terkena dampak. Bahkan memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi warganya. Tekanan di pasar keuangan dan perekonomian juga mendapat respon agresif dari otoritas moneter. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan berfungsinya pasar keuangan, dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah-langkah tersebut antara lain pemotongan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, pencegahan aliran modal, dan penetapan pengaturan swap. Kebijakan penurunan suku bunga dilakukan cukup agresif pasca merebaknya COVID-19. Instrumen kebijakan lainnya juga mengiringi kebijakan penurunan suku bunga. Bank sentral melonggarkan GWM dan mengadopsi kebijakan yang tidak konvensional (*quantitative easing/QE*) dengan membeli surat berharga pemerintah dan swasta. Batas pembelian surat berharga dinaikkan, meski The Fed tidak membatasi jumlahnya (*unlimited*). Bank sentral juga mengeluarkan kebijakan untuk memastikan pasar keuangan tetap berjalan dengan melakukan transaksi di pasar uang dan memastikan likuiditas di sistem perbankan untuk kelancaran penyaluran kredit. Kondisi yang memburuk juga telah mendorong otoritas moneter beberapa negara untuk memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan besar, termasuk maskapai penerbangan dan pemerintah daerah. (Sugihamretha, 2020)

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terlihat bahwa Covid-19 mengakibatkan penurunan kunjungan wisman ke Indonesia yang signifikan sebesar 89,22 persen pada tahun 2020. Juga terjadi penurunan permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dari periode sebelumnya seperti sektor transportasi turun sebesar 30,84%, penyediaan akomodasi, makanan, minuman turun sebesar 22,02%.

Salah satu bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk stimulus fiskal adalah insentif pajak. Diberlakukannya instrumen insentif pajak (1) PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2) Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (3) PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 bisa mendorong pemulihan pendapatan nasional pada sektor pariwisata lebih agresif. Menjaga stabilitas harga, berfungsinya pasar keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang diikuti dengan pemotongan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, pencegahan aliran modal, dan penetapan pengaturan swap merupakan tujuan atau arahan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Indonesia turut serta dalam mengikuti kebijakan fiskal guna pemulihan pendapatan nasional pada sektor pariwisata pasca pandemi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, F., & Tupamahu, S. (2020). The Moderating Effect of Strategy Orientation Between Entrepreneurship Characteristics of The Tourism Business Success. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2).
- Akhyar, M., Syahnur, S., & Asmawati. (2019). Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia. 5(2).
- Anggarini, D. T. (2021). Upaya pemulihan industri pariwisata dalam situasi pandemi Covid-19. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 22–31.
- Apriliana, Eka Sri. 2020. Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No.1.
- Azwar. 2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan* Vol. 20 No. 2.
- BPS. (2020). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Agustus 2020. *Berita Resmi Statistik*, 76(1), 1–16.
- Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia. *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XII(4),19–24.
- Dina E. S. S. & Rasinta R. 2020. G. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 3 No 2.
- Djaenuri, H.M.Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Elistia, E. (2021). Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara (Vol. 3, Issue 1).
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Dalam Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3).
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137.
- Kemendparekraf. (2021). Rencana Strategis Kemendparekraf 2020 - 2024. Kemendparekraf,1–136.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia” APBN Kita Oktober 2022 Kinerja dan Fakta” Siaran Pers. Oktober 21, 2022.
- Lativa, Saniatul. 2021. Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 23 No. 3.
- Marves, J. (2022). Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia. Jakarta: JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Masniadi, R., & Kaluge, D. (2011). Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (Pbrt) Di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Murdo, I. T., & Affan, J. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *jurnal Solusi*, 111-133.
- Nasruddin. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya* Syar-I , 2.
- Nawawi, M. (2021). Optimalisasi Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keislaman*,



- Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 22(1), 41–56.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Dwifabri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). *Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume. Majalan Media Perencanaan*, 1(1), 1–21.
- Parmadi. (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Indonesia Periode 1990 – 2007.
- Pariwisata, S., Marpaung, A. M., & Hadi, C. S. (2022). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata dan Angkatan Kerja di kota Bogor*. 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.374/jipkes.v3i2.1445>
- Patricia, C. O. S. (2021). Deiksis Dalam Film Enola Holmes Karya Harry Bradbeer (Suatu Analisis Pragmatik). *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas SAM Ratulangi*, 3(2), 6.
- Pradana, Muhammad Iqbal Wahyu & Gerry Katon Mahendra. 2021. Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*. Vol.3. No.2.
- Pratama, S., kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *3journal.undip*, 2-18.
- Primanto Bhakti, A., Soeratin, H. Z., Hari Satyaka, P., Widyajala, B., Widiadi Kindy Syahrir, A. R., Yusroni, A., Hadian, Y., Simbolon, J., Kusprihanto Purbo, R., Chalamsa Adrian Kusuma Pratama, M., Santoso, P., Miftakhul Huda, A., Agustino, M., Arisyanto, E., Alasen Sembiring Desy Puspita, B. A., Rahma, N., Nurul Nisa, N., Muhammad Syafruddin, N., Syifa Khoirunnisa, S., ... Jenderal Perimbangan Keuangan Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah, D. (2021). *Periode 3-17 Desember 2021*.
- Purnamasari, R. A. (2021). Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 118-131.
- Sapta, I. K. S. S., & Landra, N. (2018). *Bisnis Pariwisata*. CV. Noah Aletheia.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon kebijakan: Mitigasi dampak wabah Covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206.
- Sari, M. S., & Zefri, M. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21 (3): 308–15.
- Utami, Betty Silfia Ayu & Abdullah Kafabih. 2021. Sektor Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).